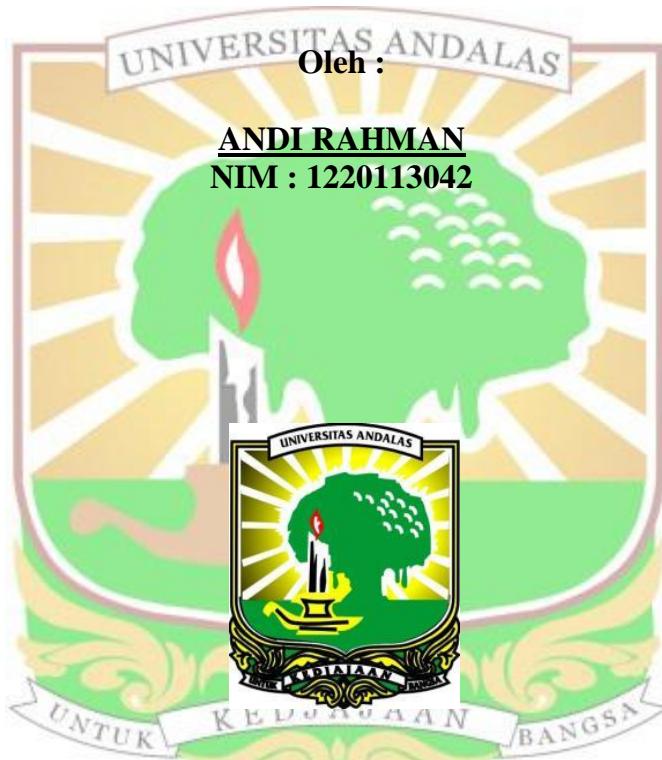


**PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
OLEH BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
TANAH DATAR**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**



Komisi Pembimbing:

1. Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
2. Dr. Yuslim, SH, MH

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Oleh Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar**

(Andi Rahman, 1220113042, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 127 halaman, 2017)

ABSTRAK

Dalam pembentukan peraturan daerah terdapat proses pengharmonisasian yang merupakan penyelarasan substansi rancangan peraturan daerah dan teknik penyusunan peraturan daerah sehingga menjadi peraturan daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Untuk pelaksanaan pengharmonisasian ini, pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Penelitian ini meneliti bagaimana pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar baik pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan metode *sosio-legal research*.

Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya dilakukan dengan mengacu kepada aspek pengharmonisasian, yaitu aspek konsepsi materi muatan rancangan peraturan daerah dan aspek teknik penyusunan rancangan peraturan daerah. Serta dalam pengharmonisasian pelibatan tenaga perancang peraturan perundang-undangan baru untuk sebagian rancangan peraturan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan rancangan peraturan daerah yang disusun secara konsepsi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan berbeda kualitas harmonisasi antara satu rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah lain.

Kedepannya perlu disusun produk hukum daerah yang mengatur bagaimana proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah ini secara rinci sehingga tidak terjadi perbedaan proses pengharmonisasian antara satu rancangan peraturan daerah dengan rancangan peraturan daerah lainnya.

Kata kunci: *Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah.*

Harmonization of the Draft of Local Regulation by Legal Division of Regional Secretariat of Tanah Datar Regency

(Andi Rahman, 1220113042, Magister Program, Fakulty Of Law Andalas University, 127 pages, 2017)

ABSTRACT

In formulation of local regulations there is a harmonization process which is the alignment of the substance of the draft of local regulations and the techniques of legislation so that it becomes a regional regulation which is a unified whole within the framework of the national legal system. For the implementation of this harmonization, the Tanah Datar District Government is conducted by the Legal Division of the Regional Secretariat. This study examines how harmonization of the draft of local regulations by the Legal Division of the Tanah Datar District Secretariat both at the stage of planning, drafting and discussion of draft local regulations by the method of *socio-legal research*.

The harmonization of the draft of the regional regulation by the Legal Division of the Tanah Datar District Secretariat has not been fully implemented with reference to the harmonization aspect, namely the conceptual aspects of the content of the draft regulations on local regulations and the technical aspects of the drafting of regional regulations. As well as, in harmonizing the involvement of legal drafter only for some of the draft local regulations. This may result in the draft of a local regulation contradictory with higher regulations, inconsistent with the principles of legislation and different harmonization quality between one draft of local regulations and others.

In the future, it is necessary to formulate a local legal product that regulates how to harmonize the draft of this regional regulation in detail so that there is no difference in the harmonization process between one draft of the local regulation and other regional regulation draft.

Keywords: *Harmonizations, Draft of Local Regulations.*